



ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
FISCAL STRESS
(Studi Kasus Pada Provinsi Jambi Periode 2018-2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian dari syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

DONA JUNIARTI

NIM: C1C019139

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI

2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh:

Nama : Dona Juniarti

NIM : C1C019139

Jurusan : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* (Studi Kasus Pada Provinsi Jambi Periode 2018-2022)**

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif pada tanggal seperti tertera dibawah ini.

Jambi, November 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Wiwik Tiswiyanti, S.E., Ak., M.M., CA
NIP. 197005121999032002

Salman Jumaili. S.E., Ak., M.Si
NIP. 197505232001121002

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Hj. Fitrini Mansur, S.E., M.Si., CAAT., CIQnR
NIP. 197311121998022002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dona Juniarti

NIM : C1C019139

Jurusan : Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress*
(Studi Kasus Pada Provinsi Jambi Periode 2018-2022)**

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini adalah karya asli penulis, selama proses penulisan tidak melakukan plagiat atas karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan disiapkan dengan kaedah ilmiah penulisan.
2. Bila ditemukan dikemudian hari ketidaksesuaian sebagaimana pada point (1), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, November 2023
Yang Membuat
Pernyataan

Dona Juniarti
C1C019139

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan salawat serta doa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW umat beliau yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajarannya serta kepada seluruh umatnya. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Skripsi ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* (Studi Kasus Pada Provinsi Jambi Periode 2018-2022)”**.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu mengalami kendala namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dorongan, semangat, saran, dan kritiknya. Khususnya kepada dan selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu memberikan semangat, pengertian dan serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmu yang berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M. Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.E., M. Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si., A.k., C.A., CIQaR., CIQnR., CIT selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. Rico Wijaya Z, S.E., M.M., M.Si., Ak., CIQnR selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
5. Ibu Dr. Hj. Fitrini Mansur, S.E., M.Si., CAAT., CIQnR selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
6. Ibu Dr. Wiwik Tiswiyanti, S.E., A.k., M.M., CA selaku Dosen Pembimbing Utama yang memberikan banyak arahan dalam menyelesaikan Skripsi dan bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kepada penulis.

7. Bapak Salma Jumaili, S.E., A.k., M. Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu proses penyelesaian Skripsi dengan berbagai arahan, saran, dan menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal untuk penulis dalam rangka memasuki dunia kerja nantinya. Beserta para karyawan lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah berjasa memberikan pelayanan terbaik bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan.
9. Kepada Ayahanda tercinta dan saya sayangi H. Ramawi, S.E., M.M yang selalu ada untuk penulis menjadi garda terdepan untuk anak tercintanya dan selalu menguatkan penulis dalam kondisi apapun selalu mendoakan terbaik untuk anak perempuannya yang selalu mendukung, memotivasi, dan memberikan kasih sayang penuh. Senyuman dan kebahagiaan menjadi alasan terbesar penulis untuk semangat meraih gelar sarjana serta impian, cita-cita penulis. Dan Berterimakasih kepada Almarhuma Ibu kandung tercinta Ernawati berkat doa dan kasih sayang penuh mak berikan kepada penulis selama hidup didunia sangat berharga doa-doa yang tidak henti-hentinya beliau panjatkan selama hidup untuk penulis agar anaknya menjadi orang yang sukses yang jadi penguat dan motivasi penulis.
10. Kepada saudara Abang kandung satu-satunya Alhusni Duki Pahlawan bagi penulis setelah bapak selalu mendoakan yang terbaik dan semangat selalu menguatkan dan mendukung penulis dalam keadaan apa pun selalu ada senyumannya menjadi salah satu alasan penulis bertahan sampai saat ini dan kedepannya.
11. Kepada teman magang saya selama di Bank 9 Jambi seperjuangan dengan saya Uni Mida, Cece Cia, Adik Hilmi, Mimin, Epril, dek Alya dan Dek Ika senantiasa mensupport dan menyemangati penulis dan memberi energi positif, menguatkan saya dalam keadaan apapun.

12. Kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2019 sejak awal kuliah hingga akhir. Terkhususnya untuk sahabat saya Suci Rahmatul Felisy, Putri Anggraini dan Nana Sefitasari yang selalu ada di saat senang maupun sedih yang telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan, saling mendukung, membantu satu sama lain dalam keadaan apapun. Doa terbaik untuk kita semoga di kemudian hari kita menjadi orang sukses yang beriman dan menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, selalu dilindungi dan dimudahkan oleh Allah SWT dalam setiap langkah kita.

13. Kepada pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini semoga selalu dilancarkan langkah dan dimudahkan dalam setiap usaha dan langkah.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kehilafan. Untuk itu penulis mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan tersebut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Jambi, November 2023

Penulis,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi, (2) untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi, (3) untuk mengetahui dana alokasi umum terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi, (4) untuk mengetahui dana bagi hasil terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi, dan (5) untuk mengetahui berapa besar pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa time series kurun waktu 2018 – 2022. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan regresi linier bergandayang di olah menggunakan alat analisis regresi sederhana SPSS 25.0. Hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.

Kata Kunci : *Fiscal Stress*, PAD, DAU, DBH, Provinsi Jambi

ABSTRACT

This research aims (1) to determine the effect of local original income, general allocation funds, and profit sharing funds on fiscal stress in Jambi Province, (2) to find out the effect of local original income on fiscal stress in Jambi Province, (3) to find out funds general allocation for fiscal stress in Jambi Province, (4) to find out the profit sharing funds for fiscal stress in Jambi Province, and (5) to find out how much local original income, general allocation funds, and profit sharing funds for fiscal stress in Jambi Province . The data used in this research is secondary data in the form of a time series for the period 2018 - 2022. The analytical method used is descriptive and quantitative analysis using multiple linear regression which was processed using the simple regression analysis tool SPSS 25.0. The research results show that Regional Original Income, General Allocation Funds, and Profit Sharing Funds simultaneously influence Fiscal Stress in Jambi Province. Regional Original Income influences Fiscal Stress in Jambi Province, General Allocation Funds influence Fiscal Stress in Jambi Province, Profit Sharing Funds influence Fiscal Stress spending in Jambi Province.

Keywords: *Fiscal Stress, PAD, DAU, DBH, Jambi Province*

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Analisis Keuangan	12
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	13
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.3 Kemandirian Daerah	20
2.4 Dana Alokasi Umum.....	24
2.5 Dana Bagi Hasil	28
2.6 <i>Fiscal Stress</i>	32
2.7 Penelitian Terdahulu	35
2.8 Kerangka Pemikiran	41
2.9 Hubungan Antar Variabel.....	41

2.9.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap <i>Fiscal Stress</i>	41
2.9.2 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap <i>Fiscal Stress</i>	42
2.9.3 Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap <i>Fiscal Stress</i>	42
2.10 Gambar Kerangka Pemikiran.....	43
2.11 Model Penelitian.....	44
2.12 Hipotesis	44
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.3 Metode Pengumpulan Data	47
3.4 Operasional Variabel.....	48
3.5 Metode Analisis Data	49
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Penelitian	54
4.1.1 Kondisi Geografis	54
4.1.2 Kondisi Kependudukan	56
4.1.3 Kondisi Ketenagakerjaan	59
4.2 Hasil Penelitian	60
4.2.1 Analisis Deskriptif.....	60
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	61
4.3.1 Uji Normalitas	61
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	62
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	63
4.5 Pengujian Hipotesis	64
4.5.1 Uji F.....	64
4.5.2 Uji t.....	65
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66
4.6 Pembahasan	67

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap <i>Fiscal Stress</i> Di Provinsi Jambi.....	67
4.6.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap <i>Fiscal Stress</i> Di Provinsi Jambi.....	68
4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap <i>Fiscal Stress</i> Di Provinsi Jamb.....	69
4.6.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap <i>Fiscal Stress</i> Di Provinsi Jambi	70
4.6.5 Besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Secara Simultan Terhadap <i>Fiscal Stress</i> Di Provinsi Jambi.....	71
BAB V	74
PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data <i>Fiscal Stress</i> Provinsi Jambi Tahun 2018-2022	3
Tabel 1.2	Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 ..	5
Tabel 2.1	Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah (dalam%)	24
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.2	Operasional Variabel.....	48
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	5
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi.....	56
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	58
Tabel 4.4	Struktur Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	60
Tabel 4.5	Deskripsi Data Penelitian.....	61
Tabel 4.6	Hasil Uji Regresi Berganda.....	63
Tabel 4.7	Hasil Uji F	65
Tabel 5.4	Hasil Uji t	65
Tabel 5.5	Hasil Uji Koefisien Determinasi	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	43
Gambar 2.2	Model Penelitian	44
Gambar 4.1	Normal P-Plot	62
Gambar 5.2	Grafik Scatterplot.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kabupaten/Kota Yang Ada Di Provinsi Jambi.....	79
Lampiran 2. Tabulasi Data.....	80
Lampiran 3. Statistik Deskriptif.....	82
Lampiran 4. Uji Normalitas	83
Lampiran 5. Uji Multikolinearitas	84
Lampiran 6. Uji Heteroskedastisitas	85
Lampiran 7. Hasil Regresi Berganda	86
Lampiran 8. Hasil Uji F (Simultan)	87
Lampiran 9. Hasil Uji t (Parsial)	88
Lampiran 10. Koefisien Determinasi	89
Lampiran 11. Tabel F	90
Lampiran 12. Tabel t	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana tidak meratanya distribusi pendapatan antar golongan masyarakat di suatu wilayah. Dalam mengukur tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan biasanya diukur dengan menggunakan indeks gini. Indeks gini merupakan suatu koefisien yang berkisar antara angka 0 sampai angka 1. Dimana koefisien tersebut menjelaskan seberapa besar tingkat pemerataan dan/atau ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin kecil koefisiennya (mendekati angka nol) maka semakin merata, sedangkan semakin besar koefisiennya (mendekati angka satu) maka semakin timpang. Dengan kata lain, angka 0 (nol) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sudah sangat merata (kemerataan sempurna), sedangkan angka satu menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat tidak merata (ketimpangan sempurna) (Nadhifah, 2018).

APBD mempunyai peran penting dalam menstimulasi perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan dan belanja. Pengaturan instrumen fiskal daerah diharapkan dapat mendorong kinerja ekonomi wilayah. Salah satu instrumen fiskal tersebut adalah pendapatan daerah yang merefleksikan kemampuan keuangan daerah baik dari elemen derajat desentralisasi maupun kemampuan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh belanja pembangunan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan sosial dengan mengalokasikan belanja bantuan sosial ke dalam anggaran pemerintah daerah (Lukman, 2019).

Menurut Johan Jasin (2019) menyatakan bahwa Otonomi dikaitkan dengan kata “daerah”, maka otonomi daerah memiliki arti pemerintahan sendiri. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pendorong dalam pencapaian target dan sasaran makro ekonomi yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD (Perimbangan Keuangan, 2017).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah memiliki kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang kemudian mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan (Periansya, 2019).

Untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan tuntutan kemandirian daerah yang tinggi dalam era otonomi agar daerah mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskal dalam rangka ternyata menimbulkan persoalan baru bagi daerah, yaitu tekanan fiskal (*fiscal stress*) (Septira, 2019) menyebutkan tidak ada definisi *fiscal stress* yang diterima secara universal, namun lebih lanjut. *Fiscal stress* merupakan tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dimana tekanan keuangan (*fiscal stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Tekanan fiskal salah satu hal yang menunjukkan kinerja kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan anggarannya.

Jumlah *Fiscall Stress* Provinsi Jambi tahun 2018-2022, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.1 Data *Fiscall Stress* Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

No	Tahun	<i>Fiscall Stress</i>
1	2018	171.094.485
2	2019	255.808.669
3	2020	135.183.487
4	2021	289.925.938
5	2022	195.937.065

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data *Fiscall Stress* di Provinsi Jambi mengalami fluktuatif atau terjadi kenaikan serta penurunan jumlah *Fiscall Stress* tiap tahunnya. *Fiscall Stress* dapat dihitung dengan cara mencari saldo dana yang diperoleh dari selisih penerimaan dan pengeluaran daerah. Perubahan fluktuatif dalam *Fiscall Stress* di Provinsi Jambi, yang tercermin dalam kenaikan dan penurunan tahunan dalam saldo dana yang diperoleh dari selisih penerimaan dan pengeluaran daerah, menjadi sebuah masalah yang perlu mendapatkan penelitian lebih lanjut. Fenomena ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami penyebabnya, dampaknya, dan mungkin solusi yang dapat diambil untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Setiap daerah yang melaksanakan otonomi dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali setiap potensi penerimaan baru agar ketersediaan dana untuk membiayai belanja daerah tetap tersedia. Jika tidak adanya penerimaan daerah yang memadai untuk membiayai belanja daerah, maka hal ini akan mempengaruhi terjadinya *fiscal stress*, mengingat perubahan pembiayaan akan lebih banyak dimana disebabkan dengan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung dalam hal ini belanja pembangunan (Sanjaya, 2021).

Peningkatan belanja modal untuk pembangunan secara langsung akan meningkatkan anggaran belanja daerah. Belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga ditujukan untuk berbagai jasa yang terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Dengan begitu *fiscal stress* dapat terjadi

karena dipicu oleh defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan (Septira, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. (Yawa, 2018).

Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Undang – Undang ini berbeda dengan Undang-Undang yang digantikannya karena isinya meliputi banyak hal terkait keuangan daerah, yaitu: pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan TKD (transfer ke daerah), pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Sebagian besar isi Undang-Undang ini berbicara mengenai pajak dan retribusi daerah (100 lebih pasal yang berbicara tentang pajak dan retribusi daerah). Terdapat banyak hal baru terkait pajak dan retribusi, dimulai dari penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penambahan jenis pajak baru baru untuk daerah yaitu berupa opsen pajak, serta reformasi dari sisi regulasi pajak dan retribusi di daerah karena nantinya regulasi pajak dan retribusi daerah harus dimuat dalam satu peraturan daerah yang didalamnya sudah memuat detil segala hal tentang pajak dan retribusi mulai dari jenis, subyek pajak, subyek retribusi, wajib pajak, wajib retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang

pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi. Disamping itu terdapat beberapa hal baru terkait Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus, mengenai formula dan pengaturan penggunaannya.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemandirian keuangan daerah yang memadai. Kemandirian keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah. Setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerahnya agar PAD dapat meningkat. Kemandirian keuangan daerah menggali PAD akan mempengaruhi bagaimana ekonomi suatu daerah (Periansya, 2019).

Berdasarkan ini jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi tahun 2018-2022, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

No	Tahun	PAD
1	2018	303.487.000
2	2019	320.929.774
3	2020	328.896.648
4	2021	364.142.193
5	2022	355.674.818

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurunnya nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun 2022 dapat menjadi indikasi masalah yang mendalam. Menurunnya nilai Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan, kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah, dan lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, dan kelemahan kualitas sumber daya manusia. Penurunan PAD ini akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi.

Nilai Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD yaitu pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, adanya konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang DAU. Bagi pusat, DAU dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk kecukupan. (Rahardjo, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dana bagi hasil merupakan komponen dari dana perimbangan yang termasuk dalam kelompok transfer pemerintah pusat. Dana bagi hasil dibagi-bagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan daerah penghasil. Hubungan dana bagi hasil terhadap belanja daerah adalah untuk mengatasi keseimbangan vertical antar tingkat pemerintah (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional mendorong pencapaian pelayanan dan standar minimum dan merangsang mobilitas pendapatan. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Aramana, 2019).

Studi tentang *fiscal stress* di tingkat daerah menjadi semakin penting terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu

menyelenggarakan pemerintahannya, penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahun (Fristanto, 2015).

Selain fluktuasi dalam perkembangan belanja daerah, terdapat juga fenomena ketidakberimbangan alokasi belanja pemerintah, antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Kondisi seperti ini juga ditemukan di seluruh kabupaten/kota yang berada dalam lingkungan Provinsi Jambi, baik daerah yang memiliki kemampuan fiskal relatif rendah maupun daerah yang kemampuan fiskalnya relatif lebih tinggi. Proporsi alokasi dana APBD untuk belanja tidak langsung ditingkat kabupaten/kota jauh lebih besar bila dibandingkan dengan APBD pemerintah provinsi. Konsekuensinya optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki daerah sulit dicapai. Proporsi pengalokasian belanja langsung yang relatif kecil berimplikasi pada rendahnya efektivitas APBD dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian tingkat kemiskinan absolut dan relatif.

Ketika pendapatan asli daerah lebih besar dari total belanja daerahnya maka hal ini menunjukkan bahwa *fiscal stress* di daerah tersebut semakin kecil begitu juga sebaliknya (Arnett, 2018). Dengan demikian perlu bagi pemerintah daerah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*.

Penelitian yang dilakukan oleh Septira, dkk pada tahun 2019 dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress*. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB berpengaruh terhadap *fiscal stress* sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel yang diteliti yaitu pertumbuhan belanja modal.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Armawaddin, dkk pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Silpa Dan *Fiscal Stress* Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil yang diperoleh

menunjukkan bahwa secara statistik, SiLPA dan tekanan fiskal secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Sebagian, SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan stress fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel yang diteliti yaitu pengaruh Silpa dan *fiscal stress* terhadap belanja modal, sedangkan dalam penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*.

Kemudian penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan *Fiscal Stress* Terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh Aryadhani Prasetyo, dan Dewi Rahayu pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DBH, dan *Fiscal Stress* berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian secara simultan, PAD dan DBH berpengaruh terhadap tingkat kemandirian, DAU dan *Fiscal Stress* berpengaruh tidak nyata terhadap tingkat kemandirian, dan PAD merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi tingkat kemandirian. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel terikat yang digunakan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhayati pada tahun 2020 dengan judul Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* Pada Pemerintahan Daerah. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa hanya perubahan anggaran di SiLPA yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan anggaran belanja, sedangkan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) dan tekanan fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran bantuan sosial Perubahan Belanja Pemerintah Daerah di Sumatera 2016-2019. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zakina Zein Al-Hadar,dkk pada tahun 2018 dengan judul Determinan Stress Fiskal Di Sulawesi Tengah Periode 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Stress Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2018 periode. Secara

parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan dan Penurunan Stres Fiskal yang signifikan di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Provinsi periode 2014-2018. Variabel belanja daerah (BD) mengalami peningkatan dan berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2014 – 2018. Sedangkan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki meningkat dan tidak signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Kabupaten/Kota Pusat Provinsi Sulawesi periode 2014 – 2018. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu belanja daerah dan PDRB. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu PAD, DAU, dan DBH.

Penelitian lain yang dilakukan Gowon,dkk pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. Secara bersama-sama pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. Perbedaan yang dilakukan Gowon,dkk dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel dependen. Dalam penelitian Gowon hanya menggunakan 2 variabel dependen sedangkan dalam penelitian ini terdapat 3 variabel dependen, alasan menambah variabel penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui variabel lain yang belum pernah diteliti sebelumnya. Perbedaan lain yaitu terletak pada periode waktu yang diteliti, dalam penelitian Gowon periode yang diteliti mulai dari tahun 2015-2018. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode terbaru yaitu mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik dan ingin mencoba untuk menganalisis penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* (Studi Kasus Pada Provinsi Jambi Periode 2018-2022)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?
5. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui Dana Bagi Hasil terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.
5. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang ilmu akuntansi dan sebagai bahan untuk menambah wawasan serta pemahaman peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat membantu manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*, sehingga dapat mengambil keputusan untuk setiap tindakan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti dimasa yang akan datang sebagai sumber rujukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Analisis Keuangan

Menurut Halim (2018) analisis keuangan merupakan upaya untuk mengenali karakteristik keuangan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah disediakan. Dalam hal ini keuangan daerah harus dikelola dengan cara yang terbuka, jujur, sesuai prinsip demokrasi, dengan hasil yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah akuntansinya berbeda dengan perusahaan swasta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melibatkan perbandingan hasil pencapaian dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga kita dapat menilai tren yang sedang terjadi. Selain itu, analisis rasio keuangan juga memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan perbandingan dengan daerah-daerah lain. Dengan membandingkan rasio keuangan antar-daerah, pemerintah daerah dapat mengevaluasi sejauh mana mereka berada dalam kinerja keuangan yang sehat dibandingkan dengan yang lain. Ini dapat membantu dalam identifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap rasio keuangan APBD meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah pusat atau provinsi, masyarakat, dan pihak-pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pemerintah daerah. Mahmudi (2019) berpendapat bahwa berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah, analisis terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan melalui:

- a. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan
- b. Menghitung pertumbuhan PAD
- c. Menghitung rasio keuangan, dimana salah satunya adalah mengukur rasio kemandirian keuangan daerah.
- d. Menilai potensi daerah yang masih dapat dioptimalkan meliputi: potensi pajak daerah dan potensi retribusi daerah.

Analisis keuangan pemerintah daerah adalah alat penting untuk mengawasi, menilai, dan memperbaiki pengelolaan keuangan publik. dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD serta perbandingan dengan daerah lain, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengambil keputusan keuangan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah cenderung ingin meningkatkan pengeluarannya dengan mengandalkan pendapatan dari pajak, meskipun masyarakat tidak senang membayar pajak besar untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang bertambah besar. Kenaikan pendapatan pajak dapat mengakibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Dalam kondisi normal, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GNP) akan menghasilkan pendapatan pemerintah yang lebih besar, yang pada gilirannya akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross dimana peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. (Mankiw, 2018).

Modal manusia sangat berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan yang terkandung pada manusia yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang akan berguna dalam produksi barang, jasa dan pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Oleh karena itulah maka kunci utama dari modal manusia

adalah pendidikan dilengkapi oleh faktor lain diantaranya kesehatan, lingkungan kerja, dan faktor lainnya. Sumber daya manusia berguna untuk meningkatkan penghasilan individu dan sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dalam bidang pendidikan memberi peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa mendatang karena dengan pendidikan maka para pekerja diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengoperasikan, mengekspansi dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi dan memanipulasi modal fisik. Produktivitas pekerja meningkat melalui perbaikan kesehatan baik secara fisik dan mental serta melalui perpindahan lokasi tempat mereka bekerja. Peningkatan investasi sumber daya manusia secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong peningkatan pendapatan (produk domestik bruto) riil. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan persediaan, neraca perdagangan, dan konsumsi rumah tangga. Investasi sumber daya manusia cenderung menyebabkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan cenderung mengurangi angka kemiskinan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian sumber pendapatan daerah dalam arti sempit. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, baik yang berupa pendapatan swadaya masyarakat atau swasta maupun dari pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak/retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Azahari, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Badrudin, 2011).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Azahari, 2018).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Yawa, 2018).

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu variabel penting dalam kerangka menuju otonomi daerah, otonomi bermakna memerintah sendiri dalam wacana administrasi publik, daerah otonom sering disebut juga sebagai *local self government*. Pemberian pemerintah pusat dapat berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah, penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran khusus

pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat, dan bagi hasil penerimaan pajak dari pusat.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

2.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Menurut Safrizal (2014) Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut UU no. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun pembagian pajak daerah sesuai pasal 2 UU No.34 tahun 2000 adalah:

a) Jenis pajak provinsi yang terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada pemilik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai sumber pendapatan untuk mendukung berbagai layanan dan infrastruktur publik.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Biaya yang harus dibayar oleh seseorang ketika mereka memindahkan kepemilikan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air dari satu individu atau entitas ke individu atau entitas lainnya. Biasanya, bea balik nama ini dikenakan ketika seseorang menjual atau mentransfer kepemilikan kendaraan kepada pihak lain.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak yang dikenakan pada bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor, seperti mobil, motor, truk, dan sejenisnya. Pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk mendukung berbagai program dan infrastruktur, termasuk perawatan jalan raya, proyek transportasi, dan layanan publik lainnya

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

jenis pajak yang dikenakan pada pengambilan dan pemanfaatan sumber daya air bawah tanah dan air permukaan oleh perusahaan, individu, atau entitas lainnya. Pajak ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan sumber daya air, serta menghasilkan pendapatan untuk mendukung program dan proyek terkait air, konservasi, dan perlindungan lingkungan

b) Jenis pajak Kabupaten/kota yang terdiri dari:

a. Pajak Hotel

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Jenis pajak yang dikenakan pada kegiatan pengambilan atau penambangan bahan galian golongan C. Bahan galian golongan C umumnya mencakup bahan galian seperti pasir, kerikil, tanah, dan batuan non-logam lainnya yang digunakan dalam konstruksi dan proyek-proyek infrastruktur.

g. Pajak Parkir

Jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada penggunaan area parkir umum atau fasilitas parkir komersial. Pajak ini biasanya dikenakan pada pemilik kendaraan yang menggunakan area parkir tertentu dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah setempat.

2) Retribusi daerah

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu dikelompokkan dalam 3 golongan sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c) Retribusi Perizinan adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari pemda yang memungut retribusi.
 - b) Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 terdiri dari :
- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b) Jasa giro
 - c) Pendapatan bunga
 - d) Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing
 - e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang

belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2018).

Ciri suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu kemandirian keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah secara mandiri dengan menggunakan pendapatan asli daerah dari daerah tersebut. Kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya: rasio efektifitas, rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan propinsi semakin rendah. Untuk memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah harus membutuhkan sumber keuangan yang cukup (Carunia, 2019).

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2018).

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Tolosang, 2018).

Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi kemandirian keuangan daerah menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen dari PAD. Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan PAD dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Derajat desentralisasi fiskal yang tinggi mengindikasikan pemerintah daerah telah mampu meningkatkan PAD dibandingkan pendapatan lain pada pendapatan daerah. Jika rasio PAD tinggi akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penggunaan dana (Carunia, 2019).

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Widjaja, 2019).

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang diperoleh oleh tiap pemerintahan kabupaten/pemerintahan kota. Semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka pemerintah kota tersebut tingkat kemandirian keuangan daerahnya tinggi. Pendapatan asli daerah itu sendiri merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas pendapatan asli daerah tersebut dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah yang dianggarkan dengan realisasi pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur pendapatan asli daerah kuat boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan struktur industri yang mantap beserta obyek pajak dan retribusi yang taat (Caska, 2018).

Kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. kemandirian daerah tercermin dalam kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dari pajak dan retribusi daerah, serta sumber pendapatan lainnya. Keberhasilan dalam meningkatkan PAD dan mengelolanya dengan efektif menjadi fondasi bagi pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kemandirian fiskal yang efektif adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berupaya secara aktif dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan lokalnya dan mengelolanya dengan transparan dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan (Saputra, 2018).

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disingkat dengan KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai balas jasa bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim dan Damyanti, 2018).

Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD (Saputra, 2018).

Untuk menganalisis permasalahan pertama diadopsi model yang dikemukakan (Halim, 2018) dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah formulasi perhitungan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

$$RK = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD

Kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi tergantung kepada tingkat kemandirian keuangannya yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah (dalam %)

Interval Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria
0-25	Rendah Sekali
>25-50	Rendah
>50-75	Sedang
>75-100	Tinggi

Sumber: (Halim, 2018)

2.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana transfer pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum, dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Anggoro, 2019).

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut pendapat Halim (2018) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang penting dan mengharuskan suatu wilayah untuk dapat menjadikan hasil pendapatan yang penting melalui pembiayaan yang di terima dari APBN. Maka dari itu penerimaan DAU difungsikan sebagai control pemerintah terhadap pendapat daerah guna memperoleh beberapa kaitan yang lebih tinggi terhadap keuangan Negara. Faktor yang dipengaruhi terhadap banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum terhadap setiap daerah merupakan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Prinsip pengalokasian dana pada DAU yaitu apabila daerah yang memiliki potensi fiskalnya cukup besar, namun apa yang dibutuhkan tergolong kecil, maka akan menerima Dana Alokasi Umum yang relative rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila potensi daerah kecil, sementara yang dibutuhkan cukup besar, maka daerah tersebut akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relative besar.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah daerah yang dialokasikan dengan tujuan menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD (Yani, 2018).

Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti bahwa penggunaannya diserahkan kepada Daerah sesuai dengan prioritas dari kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dari pengertian dan tujuan diatas disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum

(DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Anggoro, 2019).

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU disalurkan dengan cara pemindahan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah. kemudian untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertikal. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber – sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat local dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Untuk stabilitas ekonomi. Dana alokasi umum dapat dikurangi disaat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lemah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar setengah dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Yani, 2018).

Prinsip dasar Dana alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

a) Kecukupan (*adequacy*)

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor.

b) Netralitas dan efisiensi (*neutrality and efficiency*)

Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi harga relative dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternative relevan yang tersedia.

c) Akuntabilitas (*accountability*)

Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran Lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU.

d) Relevansi dengan tujuan (*relevance*)

Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai.

e) Keadilan (*equity*)

Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

f) Objektivitas dan transparansi

Sebuah sistem DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya dibuat se-transparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum.

g) kesederhanaan (*Simplicity*)

Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampaui kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan

dan kemungkinan ketidakadilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relative terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan di atas.
3. DAU untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2.5 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase (Nordiawan & Hertianti, 2018).

DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber DBH terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan daerah penghasil dan penetapan dasar perhitungan. DBH merupakan hak daerah yang dihasilkan masing-masing daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan, yang besarnya ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku atas daerah .

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. Adapun dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumberdaya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.

Pengaturan dana bagi hasil mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagihasilkan melalui potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat.

Pendapatan APBN yang dibagihasilkan dengan daerah meliputi:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi dan/atau bangunan. Dilihat dari pemungutannya, awalnya PBB termasuk pajak pusat. Namun, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis pajak daerah. Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan
- b) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- c) 9% untuk biaya pemungutan.

Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota
- b) 3,5% dibagikan secara insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pungutan pemerintah kepada masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, imbalan yang diberikan kepada negara masyarakat pembayar BPHTB adalah pengakuan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya. Besarnya bagian pemerintah daerah dari BPHTB ini adalah 80% dengan rincian 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota.

3. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21. Terhadap penerimaan pajak ini, pemerintah daerah mendapatkan bagian sebesar 20%. Bagian pemerintah daerah tersebut selanjutnya dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi. Pembagian dana bagi hasil PPh ini dilakukan setiap triwulan.

4. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam. Penerimaan ini meliputi:

a. Kehutanan

Dana Bagi Hasil Kehutanan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR). Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:

1. 16% untuk provinsi yang bersangkutan
2. 32% untuk kabupaten/kota penghasil
3. 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil Kehutanan yang berasal Dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan DBH Kehutanan yang berasal

dari DR, sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Penghitungan alokasi DBH Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan proporsi bagian pemerintah sebesar 60% dan kab/kota penghasil sebesar 40%.

b. Pertambangan umum

Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum berasal dari Iuran Tetap (Lendrent); dan Iuran Eksplorasi dan Eksploitas (Royalty). Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum yang berasal dari iuran tetap untuk daerah adalah sebesar 80%. dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum yang berasal dari iuran eksplorasi dan eksploitasi umum daerah adalah sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

c. Perikanan

DBH Perikanan, dihitung berdasarkan PNBPN sektor perikanan yang berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (P3) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Pungutan Pengusahaan Perikanan pada dasarnya merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan dan/ atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Pungutan Hasil Perikanan merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPH) dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri. Dana Bagi Hasil Perikanan merupakan dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor perikanan yang dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80%.

d. pertambangan minyak bumi

Dana Bagi Hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dana Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

e. pertambangan gas bumi

Dana Bagi Hasil pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

f. pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi berasal dari Setoran Bagian Pemerintah; atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi. Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80%. 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 21% untuk kabupaten/kota penghasil, 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu terdiri dari 2 sumber yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

2.6 Fiscal Stress

Menurut Halim (2018) *Fiscall Stress* adalah ketidakmampuan sebuah pemerintah untuk memenuhi anggarannya. *Fiscall Stress* dapat terjadi karena adanya krisis ekonomi sebagai suatu perubahan ekonomi dan penerbitan undang-undang No. 18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai suatu perubahan faktor politik. *Fiscal stress* merupakan tekanan anggaran yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh

yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil kajian Arnett menekankan bahwa *Fund Balance* (Saldo Dana = selisih penerimaan dan pengeluaran) adalah penting dalam penentuan indikator (ukuran) fiscal stress karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang mengalami permasalahan finansial sekalipun.

Andayani (2019), mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan untuk memasuki era otonomi bisa mengalami hal yang sama, tekanan fiskal (*fiscal stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran.

Menurut Halim (2018) *Fiscal stress* dapat terjadi ketika pengeluaran daerah, terutama dalam hal belanja modal, meningkat pesat tetapi sumber pendapatan daerah tidak mencukupi. Ini mengindikasikan bahwa untuk menghindari fiscal stress, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pengeluaran dan pendapatan daerah. Semakin besar tekanan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan mengandalkan potensi sumber daya lokal untuk mendanai pengeluaran, semakin tinggi tingkat fiscal stress. Kunci keberhasilan di era otonomi adalah kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber daya lokal yang potensial. Pada saat fiscal stress tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Fiscall Stress* merupakan kondisi kritis keuangan daerah dimana penerimaan daerah tidak mampu menutupi pengeluaran yang ada sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat dapat menunjukkan lemahnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya yang ada

Untuk mengindikasikan adanya *fiscal stress* dapat dilihat ketika pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja modal) mengalami peningkatan, namun apabila tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress*. *Fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

Kondisi *fiscal stress* menyebabkan Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum sepenuhnya mampu mendanai pembangunan yang ada di daerah. Artinya, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari Pusat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal. Oleh sebab itu kondisi *fiscal stress* ini menyebabkan Pemerintah Daerah wajib menggali sumber-sumber penghasilan yang berpotensi untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Dengan peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tanpa mengandalkan bantuan dari Pusat, sehingga kondisi *fiscal stress* tersebut akan berkurang.

Terdapat 5 (lima) kategori besar pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah yang dikaji oleh (Arnett, 2018), antara lain:

1. Defisit anggaran (*budget deficit*)
2. Saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*yearend unserved bugdet balance*)
3. Penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in state's revenues performance*)
4. Peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*)
5. Rasio keuangan (*financial ratios*).

2.7 Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan variabel penelitian ini telah ada dilakukan penelitian, namun penelitian tersebut hanya melibatkan beberapa variabel. Disamping itu tempat dan objek penelitian dari setiap penelitian berbeda yang menjadikan hasil penelitiannya bervariasi antar penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
PenelitianTerdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Adipura dkk, 2022)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhanekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019)	Variabel dependen: • Pertumbuhan Ekonomi Variabel independen: • Desentralisasi Fiskal • Kemandirian keuangan daerah, • Efektivitas • Efisiensi	Hasil analisis mengindikasikan bahwa, pertama,desentralisasi fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas berpengaruh terhadap Pertumbuhan Eknomi, namun Efisiensi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Eknomi. Desentrlisasi Fiskal dan Efisiensi melalui Indeks Pembangunan Manusia Tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Eknomi.Dan Kemndirin Keungan Daerah dan Efektiitas melalui Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Pertumbuhan Eknomi.

2	(Gatot Hery Djatmika, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Variabel dependen: • Belanja Modal Variabel independen: • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan	Hasil perhitungan garis regresi pada penelitian ini diperoleh PAD terhadap Belanja Modal $Y = 153853702,041 + 0,342X_1$, Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal $Y = 13194181,034 + 0,224X_2$. Hasil uji parsial pada penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil uji F secara simultan diketahui bahwa $F_{hitung} (68,077) > F_{tabel} 2,70$. Dengan tingkat signifikansi $0,00 > 0,05$, hal ini menunjukkan pengaruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Anggaran Pembiayaan secara simultan (bersama-sama).) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,586 atau sebesar 58,6%.
3	(Lucky Fajar Prasetyo, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur	Variabel dependen: • Belanja Modal Variabel independen: • Pendapatan Asli Daerah • Dana Bagi Hasil • Dana Alokasi Khusus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana bagi hasil secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

4	(Gowon dkk, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Jambi	Variabel dependen: • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) Variabel independen: • Fiscal Stress	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. 2) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. 3) Secara bersama – sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018.
5	(Mardianis, Afrizal, dan Enggar, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi	Variabel dependen: • Kinerja Pemerintah Daerah Variabel independen: • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Perimbangan • Belanja Daerah • Opini Audit BPK	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji secara parsial, variable Pendapatan Asli Daerah yang diproksikan dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan, variabel Dana Perimbangan yang diproksikan dengan Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan, variable realisasi belanja daerah yang diproksikan dengan rasio total realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja, dan variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan secara simultan, membuktikan bahwa variable Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah serta Opini Audit BPK RI, berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2009-2013 dengan nilai adjusted R squared hanya menjelaskan 18.71% dari variabel kinerja penyelenggaraan Pemda

6	(Ira Safitri, 2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Alokasi Belanja Modal	Variabel dependen: Belanja Modal Variabel independen: • PAD • Dana Bagi Hasil • Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.
7	(Kholidi, Zamzami, dan Machpudin, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2014)	Variabel dependen: • Belanja Modal Variabel independen: • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Khusus (DAK) • Dana Bagi Hasil (DBH) •	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan secara parsial Variabel Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
8	(Forza dkk, 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jambi)	Variabel dependen: • Pertumbuhan ekonomi Variabel independen: • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU) • Belanja Modal •	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa; Pertama, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Dengan demikian peneliti ini berhasil membuktikan bahwa PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Kedua, Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/ kota Provinsi Jambi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PAD, DAU, dan BM berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

9	(Henny Yulsiati, 2018)	Pengaruh Bagi Hasil Daerah Dan Alokasi Umum Dari Dana Belanja Langsung Kabupaten/Kota Pemerintah Di Propinsi Sumatera Selatan	Variabel dependen: • Belanja Modal Variabel independen: • Pendapatan Asli Daerah • Dana Bagi Hasil • Dana Alokasi Umum	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pendapatan daerah, bagi hasil dan umum alokasi dana berpengaruh signifikan secara langsung pengeluaran.
10	(Adriana, Muthia dan Indrawati, 2017)	Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau	Variabel Dependen: • Fiscal Stress Variabel Independen: • Pertumbuhan PAD • Diversifikasi Fiskal • PDRB • Pertumbuhan Belanja Modal • Diversifikasi Pendapatan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap Fiscal Stress, Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif terhadap Fiscal Stress, Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh terhadap Fiscal Stress, Pertumbuhan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Fiscal Stress, dan Diversifikasi Pendapatan Daerah berpengaruh negatif terhadap Fiscal Stress. Secara simultan Pertumbuhan PAD, Diversifikasi Fiskal, PDRB, pertumbuhan Belanja Modal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Fiscal Stress
11	(Pangestu <i>et al.</i> , 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Propinsi Jambi 2009-2017)	Variabel dependen: • Belanja Modal Variabel independen: • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Alokasi Umum (DAU)	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa (1) PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. (2) DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal. (3) PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.
12	(Syifa, Suhendar dan Purnama, 2021)	Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah, Pertumbuhan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	Variabel dependen: • Fiscal Stress Variabel independen: • Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah • Pertumbuhan Belanja Model • Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Fiscal Stress.

13	(Putra, Syahbandi dan Mahdi, 2023)	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Fiscal Stress Melalui Pertumbuhan Ekonomi	Variabel dependen: • Fiscal Stress Variabel independen: • Belanja Modal • Pendapatan Asli daerah • Pertumbuhan Ekonomi	hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap stress fiskal dan perekonomian pertumbuhan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Modal pertumbuhan pengeluaran mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap tekanan fiskal, sementara itu Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memberikan dampak positif yang signifikan pada tekanan fiskal. Namun belanja modal tumbuh dan asli daerah pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
14	(Rupilu, Tanan dan Lakusa, 2023)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress	Variabel dependen: • Fiscal Stress Variabel independen: • Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah • Pertumbuhan Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD PEMDA daratan pulau Timor mempunyai dampak positif terhadap tekanan fiskal, selain itu hasilnya juga menunjukkan hal itu belanja modal berpengaruh negatif Fiscal Stress dan secara bersamaan atau sekaligus PAD dan belanja modal berdampak pada tekanan fiskal
15	(Neni Nurhayati, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stress Fiskal Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kecamatan Wilayah Kunci Bersama Periode 2015 - 2019)	Variabel dependen: • Fiscal Stress Variabel independen: • Pendapatan Asli Daerah • Belanja Modal	Hasil pengujian diketahui pendapatan daerah dan belanja modal mempengaruhi Fiscal Stress. Pendapatan daerah berpengaruh negatif terhadap Fiscal Stress, sedangkan modal pengeluaran berpengaruh positif terhadap Fiscal Stress.

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2023

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut (Suriasoemantri, 2020), merupakan suatu penjelasan yang berfungsi untuk memaparkan serta Menyusun semua yang sudah ada di dalam suatu penelitian untuk diselesaikan. Pada penelitian ini pokok bahasan utama yakni mengenai pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, kemandirian daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja bantuan sosial.

2.9 Hubungan Antar Variabel

2.9.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap *Fiscal Stress*

Pertumbuhan PAD memiliki dampak atas *fiscal stress* suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan PAD mempengaruhi tingkat *fiscal stress* suatu daerah. Beberapa pemerintah daerah memiliki strateginya sendiri untuk meningkatkan pendapatan mereka, tergantung pada karakteristik pemerintah daerah tersebut. Adanya perubahan baik kenaikan maupun penurunan dari komponen penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh daerah tersebut dan komponen dari sektor penerimaan dalam APBD yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi *fiscal stress* adalah proporsi retribusi daerah, sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya sedikit naik dalam komposisi PAD. Semakin tinggi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemungkinannya daerah itu mengalami *fiscal stress*, dikarenakan daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan PAD-nya guna mencapai keseimbangan anggaran daerah. Penting untuk diingat bahwa tingkat pertumbuhan PAD suatu daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perekonomian nasional, perubahan dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat, dan perubahan dalam tingkat inflasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang adaptif dan responsif untuk mengatasi potensi *fiscal stress* yang dapat muncul akibat perubahan dalam komponen penerimaan daerah serta faktor eksternal tersebut. Hal ini akan membantu mereka menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan pelayanan publik yang berkelanjutan bagi penduduknya.

2.9.2 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap *Fiscal Stress*

DAU merupakan salah satu komponen belanja APBN dan merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD yang dilakukan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN (Amalia, 2019). Dana Alokasi Umum merupakan salah satu penerimaan daerah yang paling penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Umum kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan *fiscal* antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah. Hal ini berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*. Dengan alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, DAU membantu mengamankan sumber pendapatan yang stabil untuk daerah tersebut. Hal ini dapat memberikan kepastian dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta mengurangi risiko *fiscal stress* yang mungkin timbul akibat fluktuasi dalam sumber pendapatan lokal. Dengan demikian, DAU tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk menyediakan layanan publik yang konsisten dan berkualitas bagi penduduknya.

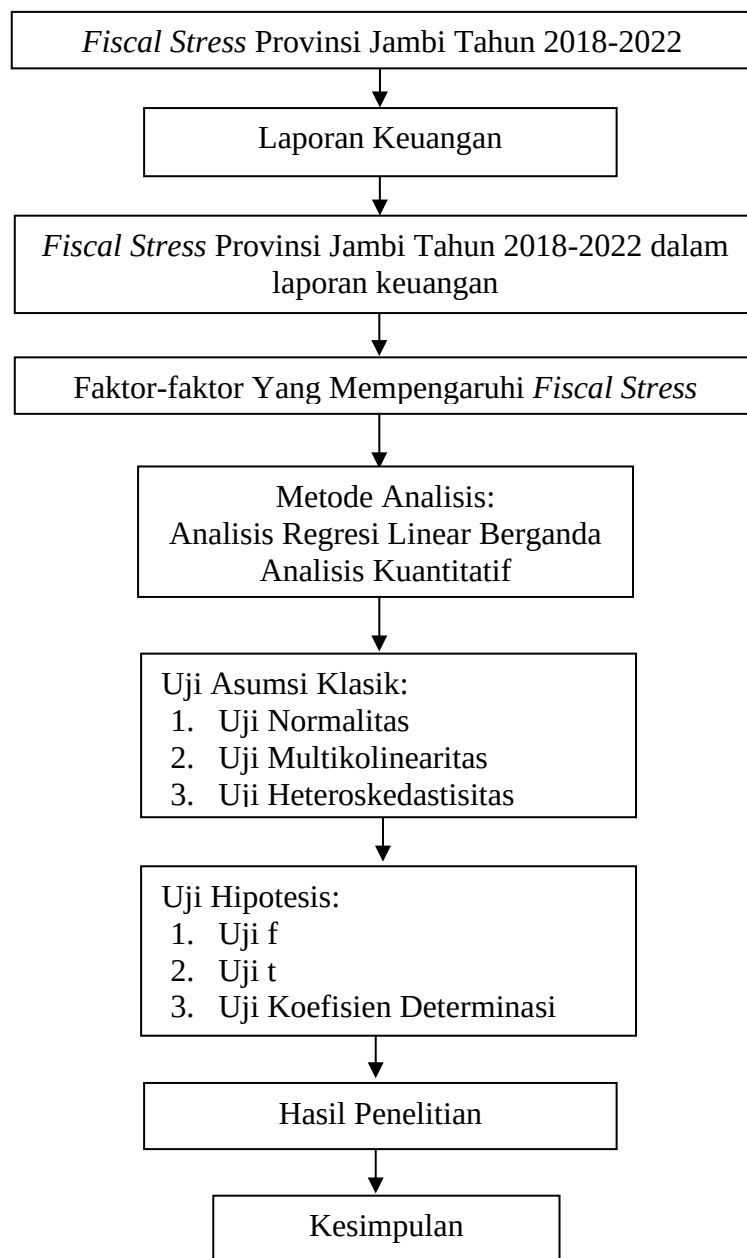
2.9.3 Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap *Fiscal Stress*

Melalui pengaturan dana bagi hasil diharapkan mampu mengelola keuangan dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dana bagi hasil pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan yang bukan berasal dari PAD dan DAU. Dengan demikian, pengelolaan dan peningkatan Dana Bagi Hasil dapat membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan mereka tanpa terlalu bergantung pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD) atau Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga ketika dana bagi hasil meningkat maka diharapkan dapat mengatasi *Fiscal Stress* pada suatu daerah.

2.10 Gambar Kerangka Pemikiran

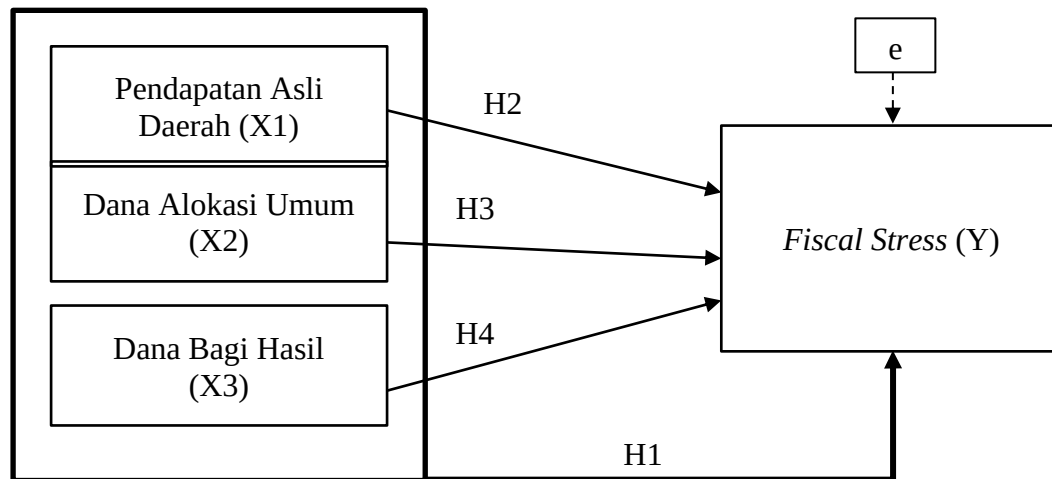
Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat secara ringkas pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

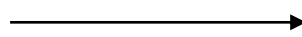
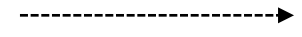
2.11 Model Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian sebagai dasar untuk mengajukan hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Model Penelitian

Keterangan:

-  : Pengaruh secara simultan
-  : Pengaruh secara parsial
-  : Pengaruh variabel lainnya

2.12 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan uraian perumusan masalah, teori, konsep serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- H1 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress* Provinsi Jambi
- H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* Provinsi Jambi.

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* Provinsi Jambi.

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* Provinsi Jambi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Cresswell (2022) Metode penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pengujian teori-teori tertentu dengan mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah teori yang ada. Dalam penelitian kuantitatif, prosesnya melibatkan pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan penyajian hasil penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa deret berkala (*Time series*). Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dari mengutip sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder biasanya telah di kumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan di publikasikan kepada masyarakat pengguna data.

3.2.2 Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah bagian yang umum serta terdiri dari beberapa objek atau subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti, dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Jambi yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 9 Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Batanghari. Lalu 2 Kota yang terdiri dari Kota

Jambi dan Kota Sungai Penuh selama 5 Tahun. Sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 55.

3.2.3 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi, agar suatu penelitian menjadi bisa di percaya, dan bisa ditarik kesimpulannya, hal ini karena sampel bisa mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang mana memiliki beberapa kriteria tertentu dalam sebuah pengambilan sampel. Sampel pada penelitian ini yaitu :

1. Data Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 – 2022 di Provinsi Jambi
2. Data Dana Alokasi Umum pada tahun 2018 – 2022 di Provinsi Jambi
3. Data Dana Bagi Hasil pada tahun 2018 – 2022 di Provinsi Jambi

3.2.4 Metode Penarikan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sample secara *purposive sampling* dimana sampel yang dipilih bersifat tidak acak. Variabel penelitian selama periode 2018-2022 hanya 11 Kabupaten/Kota dengan periode penelitian 5 tahun. Sehingga jumlah sampel akhir sebanyak 55 sampel.

3.2.5 Sumber Data

Pada penelitian ini data sekunder di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi dan Kementerian Keuangan Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama kurun waktu tahun 2018-2022.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian

sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini diperoleh dari website Pemerintah Provinsi Jambi dan website Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi serta diperkuat dengan hasil analisis yang dilakukan peneliti terdahulu dan sumber bacaan terkait yang menjadi acuan kalayakan hasil penelitian.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mengutip sumber yang ada, menggunakan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang di dapatkan dari pusat maupun dari literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Operasional Variabel

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman pengertian penafsiran variabel penelitian yang digunakan dalam analisis dan pembahasan, beberapa pengertian dasar atau konsep operasioal variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau peruundang-undangan yang berlaku	$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah$	Rasio
2.	Dana Alokasi Umum (X2)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan	$DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal$	Rasio

		keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi		
3.	Dana Bagi Hasil (X3)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	DBH = Pendapatan APBN yang Dialokasikan Kepada Daerah Berdasarkan Angka Persentase Dana Kebutuhan Daerah	Rasio
4.	<i>Fiscal Stress</i> (Y)	Tekanan anggaran yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	<i>Fiscal Stress</i> = Saldo Dana = Selisih Penerimaan dan Pengeluaran	Rasio

Sumber: Data Diolah, 2023

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Arikunto (2021) statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Penyajian data dalam statistic antara lain melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan rata-rata dan standar deviasi, dan perhitungan persentase.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Arikunto (2021) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas juga melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mengetahui apakah

residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Karena analisis grafik dapat menyesatkan, maka dilakukan juga uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan melihat tingkat signifikansinya. Uji ini dilakukan sebelum data diolah. Pendeteksian normalitas data apakah terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Residual dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$ dan jika $< 0,05$ maka data data berdistribusi tidak normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti data sesungguhnya.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel independen. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Arikunto, 2021).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Arikunto (2021) Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah $\hat{Y}$ yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$) yang telah di studentized. Adapun dasar atau kriteria pengambilan keputusan berkaitan dengan gambar tersebut adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Arikunto, 2021).

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis kuantitatif adalah analisa yang menggunakan menggunakan model-model, seperti model matematika (*statistic econometric*). Analisis regresi linier adalah salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y). Hasil analisa disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian menggunakan alat analisis regresi sederhana SPSS 25.0. Berikut model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Nazarudidin dan Basuki, 2015):

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + bX_4 + e$$

Dimana : Y = *Fiscal Stress*

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Dana Bagi Hasil

e = Variabel pengganggu atau error

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji F

Menurut Arikunto (2021) uji F disebut juga dengan uji simultan, uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan derajat signifikan sebesar 0,05, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara simultan, uji F dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ atau 0,05

2. Kriteria Keputusan

Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ = artinya antara variabel independen (X) secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ = artinya antara variabel independen (X) secara bersama-sama terdapat pengaruh terhadap variabel dependen (Y)

3.5.4.2 Uji t

Menurut Arikunto (2021) Uji t atau parsial pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independent (X) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y). Salah satu cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistic t dengan t tabel. Untuk menguji apakah masing-masing variabel independen (bebas) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (terikat). Pada uji t secara parsial dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menentukan taraf signifikansi

Taraf signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ atau 0,05

2. Kriteria keputusan

Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ dan nilai t hitung $< t$ tabel artinya terdapat pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Sebagai suatu indikator untuk menggambarkan seberapa banyak atau seberapa besar pengaruh yang dijelaskan dalam model. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, atau interval antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas atau sedikit. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berdasarkan nilai koefisien determinasi dapat diketahui tingkat kesesuaian hubungan antara variabel. Koefisien determinasi digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh variabel bebas yang diteliti X_1 dan X_2 terhadap variabel terikat Y . (Arikunto, 2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 nomor 112), yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Setelah adanya Pemekaran tersebut Provinsi Jambi memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Secara geografis, Provinsi Jambi terletak pada 0°45'-2°45' Lintang Selatan dan antara 101°10'-104°55' Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Posisi provinsi Jambi cukup Strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl dibagian timur sampai pada ketinggian diatas 1000 m dpl. Semakin ke arah barat morfologi lainnya semakin tinggi dimana bagian barat merupakan kawasan pergunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terhadap perubahan iklim. Sepanjang tahun

2015, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga provinsi jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan mencapai 3.030 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 4,2 jam per hari dengan kelembapan udara rata-rata sebesar 97%. Suhu udara rata-rata mencapai 27°C, sedangkan untuk dataran tinggi wilayah barat mencapai 22°C.

Luas wilayah Provinsi Jambi adalah 52.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 km². Daerah yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Merangin yaitu 7.679,00 km² atau 15,31 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi. Sementara daerah yang memiliki luas terkecil adalah Kota Jambu yaitu 205,43 km² atau 0,41 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh dengan luas Sekitar 391,50 km² atau 0,78 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Kerinci	3.355,27	6,69
2	Merangin	7.679,00	15,31
3	Sarolangun	6.184,00	12,33
4	Batang Hari	5.804,00	11,57
5	Muaro Jambi	5.326,00	10,62
6	Tanjung Jabung Timur	5.445,00	10,86
7	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	9,27
8	Tebo	6.461,00	12,88
9	Bungo	4.659,00	9,29
10	Kota Jambi	205,43	0,41
11	Kota Sungai Penuh	391,50	0,78
Provinsi Jambi		50.160,05	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa ada 8 kabupaten yang memiliki luas wilayah diatas rata-rata. Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Merangin dengan luas 7.679 km² atau 15,31 persen dari luas provinsi Kabupaten Tebo dengan luas 6.461 km² atau 12,88 perse dari luas provinsi, Kabupaten Sarolangun dengan luas 6.184 km² atau 12,33 persen dari luas provinsi, Kabupaten Batang Hari dengan luas 5.804 km² atau 11,57 persen dari luas provinsi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Luas 5.445 km² atau 10,86 persen dari luas provinsi, Kabupaten

Muaro Jambi dengan luas 5.326 km² atau 10,62 perse dari luas provinsi, Kabupaten Bungo dengan luas 4.659 km² atau 9,29 persen dari luas provinsi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas 4.649,85 km² atau 9,27 persen dari luas provinsi.

4.1.2 Kondisi Kependudukan

Kota Jambi merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 576.067 jiwa. Besarnya jumlah penduduk di Kota jambi didorong oleh peranannya sebagai ibukota Provinsi dan juga sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total	Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	(Jiwa)	(%)
1	Kerinci	117,301	117,581	234,882	6.90
2	Merangin	187,588	178,727	366,315	10.77
3	Sarolangun	141,679	136,543	278,222	8.18
4	Batang Hari	132,987	127,644	260,631	7.66
5	Muaro Jambi	206,277	192,880	399,157	11.73
6	Tanjabt看	109,718	103,952	213,670	6.28
7	Tanjabbar	160,977	149,937	310,914	9.14
8	Tebo	170,556	160,406	330,962	9.73
9	Bungo	175,997	168,103	344,100	10.11
10	Kota Jambi	289,713	286,354	576,067	16.93
11	kota Sungai Penuh	43,226	43,906	87,132	2.56
Provinsi Jambi		1,736,019	1,666,033	3,402,052	100

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Jambi sebanyak 1.736.019 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah sebanyak 1.666.033 jiwa. Terdapat 6 kabupaten/kota yang jumlah penduduk laki-lakinya diatas rata-rata jumlah provinsi, yaitu Kota Jambi dengan jumlah penduduk sebanyak 289.713 jiwa, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 206.227 jiwa, Kabupaten Merangin sebanyak 187.588 jiwa, Kabupaten Bungo sebanyak 175.977 jiwa, Kabupaen Tebo sebanyak 170.556 jiwa, dan Kabupaten Tanjabbar

sebanyak.160.977 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk laki-laki dibawah rata-rata yaitu Kabupaten Sarolangun dengan penduduk sebanyak 141.679 jiwa, Kabupaten Batang Hari sebanyak 132.987 jiwa, Kabupaten Kerinci sebanyak 117.301 jiwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 109.718 jiwa dan Kota Sungai Penuh Sebanyak 43.226 jiwa.

Terdapat 5 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk perempuan terbanyak di Provinsi Jambi yaitu Kota Jambi sebanyak 286.354 jiwa, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 192.880 jiwa, Kabupaten Merangin 178.727 jiwa, Kabupaten Bungo sebanyak 168.103 jiwa, Kabupaten Tebo sebanyak 160.406 jiwa. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk perempuan dibawah rata-rata terdapat 6 kabupaten/kota antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 149.937 jiwa, Kabupaten Sarolangun sebanyak 136.543 jiwa, Kabupaten batang hari sebanyak 127.644 jiwa, Kabupaten Kerinci sebanyak 117.581 jiwa, Kabupaten tanjung jabung Timur sebanyak 103.952 jiwa, dan Kota Sungai Penuh sebanyak 43.906 jiwa.

Berdasarkan total jumlah penduduk, Kota Jambi memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu sebanyak 576.067 jiwa atau sebesar 16,93 persen dari total jumlah penduduk keseluruhan Provinsi, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kota Sungai Penuh yaitu sebanyak 87.132 jiwa atau 2,66 persen dari total provinsi, kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk diatas rata-rata antara lain Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebanyak 399.157 jiwa atau 11,73 persen dari total provinsi, Kabupaten Merangin sebanyak 366.315 jiwa atau 10,77 persen dari toal provinsi, Kabupaten Bungo seabanyak 344.100 jiwa atau 10,11 persen dari total provinsi, Kabupaten Tebo sebanyak 360,962 jiwa atau 9,73 persen dari total provinsi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 310.914 jiwa atau 9,14 persen dari total provinsi.

Penduduk dibawah rata-rata antara lain Sarolangun sebanyak 278.222 jiwa atau 8,18 persen dari total Provinsi, Batanghari sebanyak 260.631 jiwa atau 7,66 persen dari total Provinsi, Kabupaten Kerinci sebanyak 234.882 jiwa atau 6,90 persen dari total provinsi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 213.670 jiwa atau 6,28 persen dari total provinsi. Laju pertumbuhan penduduk digunakan sebagai

alat untuk menganalisis perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jambi. Dalam lima tahun terakhir rata-rata Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi sebesar 1,93 persen. Untuk kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi ialah Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,08 persen, dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Kerinci dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,47 persen pertahun.

Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Tahun		LPP
		2010	2018	
1	Kerinci	229.495	234.882	0,47
2	Merangin	333.206	366.315	1,91
3	Sarolangun	246.245	278.222	2,47
4	Batang Hari	241.334	260.631	1,55
5	Muaro Jambi	342.952	399.157	3,08
6	Tanjabt看	205.272	213.670	0,81
7	Tanjabbar	278.741	310.914	2,21
8	Tebo	297.735	330.962	2,14
9	Bungo	303.135	344.100	2,57
10	Kota Jambi	531.857	576.067	1,61
11	Kota Sungai Penuh	82.293	87.132	1,15
Provinsi Jambi		3.092.265	3.402.052	1,81

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dilihat dari tabel tersebut periode 2010-2018 Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Tebo, dan Merangin memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk diatas laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten tersebut sebesar 2,57 persen, 2,21 persen, 2,47 persen, 2,14 persen dan 1,91 persen. Sedangkan wilayah yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk dibawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi antara lain Kabupaten Merangin 1,91 persen, Kota Jambi 1,61 persen, Kabupaten Batang Hari sebesar 1,55 persen, Kota Sungai Penuh sebesar 1,15 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,81 persen, dan kabupaten Kerinci 0,47 persen.

4.1.3 Kondisi Ketenagakerjaan

Tenaga kerja atau man power terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja ini sendiri digolongkan kedalam penduduk usia kerja atau bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan yang bukan tenaga kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya seperti pensiunan, penderita cacat, dan sebagainya. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.620.752 jiwa yang terdiri dari 1.550.403 penduduk yang berkerja dan 70.349 penduduk yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). Persebaran jumlah angkatan kerja terbesar berada di Kota Jambi dengan jumlah mencapai 274.499 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja terkecil berada di Kota Sungai Penuh dengan jumlah mencapai 42.872 jiwa.

Terdapat 6 kabupaten/kota dengan jumlah angkatan kerja diatas rata-rata Provinsi yaitu 147.341 jiwa atau 9,09 persen. Kabupaten/Kota tersebut anatara lain Kota Jambi dengan jumlah 274.449 jiwa atau 16,93 persen, Muaro Jambi dengan jumlah 175.959 jiwa atau 10,74 persen, Tebo dengan Jumlah 169.192 jiwa atau 10,70 persen, Kabupaten Merangin dengan jumlah 167.702 jiwa atau 10,35 persen, Kabupaten Bungo dengan jumlah 154.992 jiwa atau 9,56 persen dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah 147.698 jiwa atau 9,11 persen.

Selain memiliki jumlah penduduk yang berkerja terbanyak, Kota Jambi juga memiliki jumlah pengangguran terbanyak yaitu 20.098 jiwa atau 28,57 persen dari total provinsi. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 9.510 jiwa atau 13,52 persen, dan Kabupaten Merangin sebanyak 9.020 jiwa atau sebesar 12,82 persen dari total provinsi. Sedangkan 8 Kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Kerinci, Batang Hari, Tanjung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Kota Sungai Penuh mmiliki jumlah pengangguran dibawah rata-rata provinsi. Untuk melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Struktur Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	AK	BAK	PUK	TPAK
1.	Kerinci	125.755	50386	176.141	71,39
2.	Merangin	167.702	91787	259.489	64,63
3.	Sarolangun	136.788	57250	194.038	70,50
4.	Batang hari	118.563	67223	185.786	63,82
5.	Muaro Jambi	175.959	111873	287.832	61,13
6.	Tanjab Timur	106.782	49834	156.616	68,18
7.	Tanjab Barat	147.698	72358	220.056	67,12
8.	Tebo	169.192	65888	235.080	71,97
9.	Bungo	154.992	87930	242.922	63,80
10.	Kota Jambi	274.449	154093	428.542	64,04
11.	Kota Sungai Penuh	42.872	21090	63.962	67,03
Provinsi Jambi		1.620.752	829712	2.450.464	66,14

Sumber BPS Provinsi Jambi

Dilihat dari tabel terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tertinggi di Provinsi Jambi terdapat pada Kabupaten Tebo dengan nilai TPAK sebesar 71,97 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPAK Provinsi Jambi sebesar 66,14 persen, Kabupaten/Kota lainnya yang memiliki Angka TPAK lebih tinggi dari TPAK Provinsi Jambi antara lain Kabupaten Kerinci sebesar 71,39 persen, Kabupaten Sarolangun sebesar 70,50 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 68,18 persen, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 67,12 persen, dan Kota Sungai Penuh sebesar 67,03 persen. Sedangkan Kabupaten Merangin, Kota Jambi, Batang Hari, Bungo dan Muaro Jambi memiliki TPAK lebih rendah dibandingkan TPAK Provinsi Jambi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan angka yang menunjukkan berapa banyak jumlah angkatan kerja yang tidak berkerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Deskriptif

Deskripsi data memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata atau mean. Pada penelitian ini deskripsi data yang diberikan sesuai dengan variabel pada penelitian ini yakni pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil.

Deskripsi data pada penelitian ini untuk variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Deskripsi Data Penelitian

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata (Mean)
Pendapatan Asli Daerah	25.000.000.000	384.000.000.000	116.332.656.585
Dana Alokasi Umum	1.288.418.327	2.598.000.000.000	630.123.653.583
Dana Bagi Hasil	2.500.000.000	304.324.465.000	73.337.405.406
Fiscal Stress	745.030.337	1.754.896.149	1.288.738.483

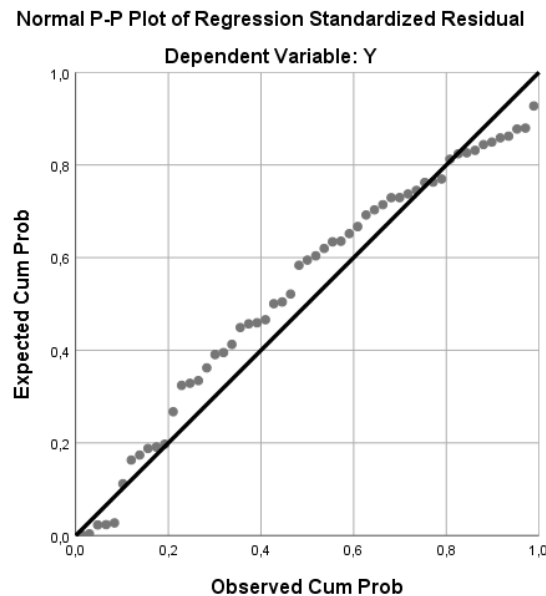
Sumber: Olah Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 116.332.656.585, variabel Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 630.123.653.583, dan untuk variabel Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 73.337.405.406. Dana pendapatan asli daerah paling kecil sebesar Rp.25.000.000.000, untuk variabel dana alokasi umum sebesar Rp. 1.288.418.327, dan untuk variabel dana bagi hasil sebesar Rp.2.500.000.000. Sedangkan untuk nilai paling tertinggi pada variabel pendapatan asli daerah sebesar Rp.384.000.000.000, untuk angka maksimal pada variabel dana alokasi umum sebesar Rp.2.598.000.000.000, dan untuk variabel dana bagi hasil sebesar Rp.304.324.465.000.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah ada data variabel dengan variabel bebas keduanya memiliki hubungan distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan grafik p-plot dengan SPSS. Hasil pengujian normalitas menggunakan P-Plot dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Olah Data Primer, 2023

Gambar 4.1
Normal P-Plot

Berdasarkan gambar grafik P-Plot tersebut dapat diketahui bahwa penyebaran data pada garis diagonal telah memenuhi syarat asumsi normalitas dikarenakan titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan tidak menyebar jauh dari garis diagonal juga mengikuti arah garis diagonal tersebut. Dengan demikian model regresi berdistribusi normal atau memenuhi syarat asumsi normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Sehingga dengan uji ini dapat diketahui bahwa untuk masing-masing variabel bebas memang benar-benar bebas. Dalam penelitian ini, untuk melakukan uji multikolinearitas menggunakan program aplikasi SPSS. Adapun hipotesisnya adalah dengan dasar pengambilan keputusan:

Jika skor VIF < 10 dan tolerance > 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas

Jika skor VIF > 10 dan tolerance < 0,10 artinya terjadi multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics
Model		B	Std. Error				Tolerance VIF
1	(Constant)	8,088	,476		16,997	,000	
	Pendapatan Asli Daerah	,017	,008	,265	2,058	,045	,974 1,027
	Dana Alokasi Umum	,011	,029	,050	,383	,703	,967 1,034
	Dana Bagi Hasil	,066	,023	,372	2,858	,006	,954 1,049

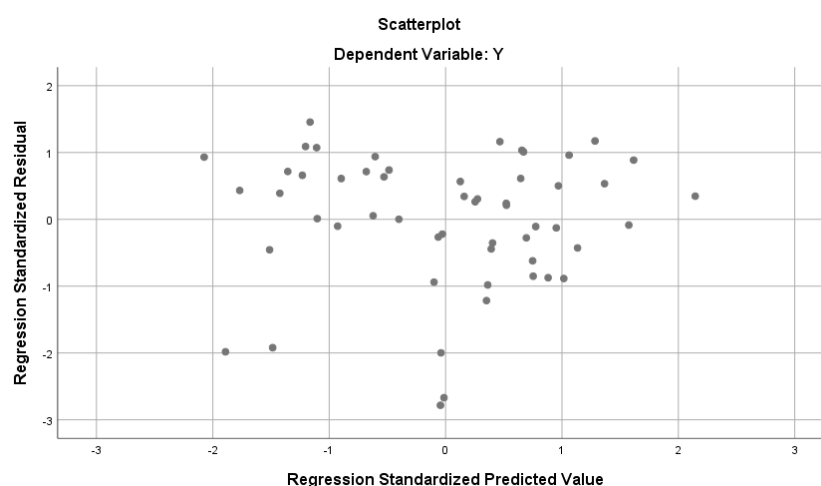
a. Dependent Variable: Fiscal Stress

Sumber: Olah Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai VIF jika dibandingkan maka nilai $VIF < 10$ selain itu jika dilihat pada nilai tolerance maka terlihat bahwa nilai tolerance $> 0,10$. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara pendapatan asli daerah (X_1), dana alokasi umum (X_2), dan dana bagi hasil (X_3) tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* dari pengolahan *SPSS Statistics 25* pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Olah Data Primer, 2023

Gambar 4.2
Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar grafik scatterplot tersebut dapat terlihat bahwa model regresi tidak membentuk pola tertentu dalam grafik sehingga tidak mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta
		B	Std. Error	
1	(Constant)	8,088	,476	
	Pendapatan Asli Daerah	,017	,008	,265
	Dana Alokasi Umum	,011	,029	,050
	Dana Bagi Hasil	,066	,023	,372

a. Dependent Variable: Fiscal Stress

Sumber: Olah Data Primer, 2023

Dari hasil analisis program SPSS maka dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk. Adapun persamaan regresi linier yang terbentuk adalah:

$$Y = 8,088 + 0,017 X_1 + 0,011 X_2 + 0,066 X_3$$

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh konstanta (a) sebesar = 8,088. Hal ini berarti jika semua variabel independent (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil) dianggap sama dengan nol (0) maka nilai variabel dependent (fiscal stress) sebesar 8,088. Kemudian diperoleh koefisien variabel pendapatan asli daerah (X1) sebesar 0,017. Nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah bertanda positif terhadap fiscal stress dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel pendapatan asli daerah dinaikkan 1 point atau satuan sementara, maka variabel fiscal stress (Y) akan meningkat sebesar 0,017.

Untuk variabel dana alokasi umum diperoleh koefisien 0,011. Nilai koefisien dana alokasi umum bertanda positif terhadap fiscal stress dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel

dana alokasi umum dinaikkan 1point atau satuan sementara, maka variabel fiscal stress (Y) akan meningkat sebesar 0,011.

Koefisien variabel dana bagi hasil (X2) diperoleh 0,066. Nilai koefisien variabel dana bagi hasil bertanda positif terhadap fiscal stress dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,066. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel dana bagi hasil dinaikkan 1point atau satuan sementara, maka variabel fiscal stress (Y) akan meningkat sebesar 0,066.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel bebas (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil) terhadap variabel terikat (*fiscal stress*).

Berikut merupakan hasil uji F yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,072	3	,024	3,647	,019 ^b
	Residual	,336	51	,007		
	Total	,408	54			

a. Dependent Variable: Fiscal Stress

b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Sumber: Olah Data Primer, 2023

Berdasarkan hasil uji F dengan bantuan perhitungan dari program SPSS maka terlihat bahwa dalam uji F statistik ini terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,019 kurang dari 0,05 yaitu $0,019 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara bersama-sama mempengaruhi fiscal stress secara signifikan.

4.5.2 Uji t

Uji *t* bertujuan untuk melihat secara parsial pengaruh masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) bermakna atau tidak. Uji *t* dapat dilihat dari nilai signifikansi dan nilai *t* hitung. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$

maka ada pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Hasil pengujian uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,088	,476		16,997	,000
Pendapatan Asli Daerah	,017	,008	,265	2,058	,045
Dana Alokasi Umum	,011	,029	,050	,383	,703
Dana Bagi Hasil	,066	,023	,372	2,858	,006

a. Dependent Variable: Fiscal Stress

Sumber: Olah Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh hasil nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah 0,045, nilai signifikansi variabel dana alokasi umum 0,703 dan nilai signifikansi variabel dana bagi hasil sebesar 0,006. Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap fiscal stress dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Artinya pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil mampu mempengaruhi fiscal stress. Sedangkan variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh secara parsial dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,703 > 0,05$.

Tabel 4.9
Kesimpulan Hipotesis

Variabel Bebas	F-Hitung	F-Tabel	t-Hitung	t-Tabel	Kesimpulan
H1 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap <i>Fiscal Stress</i> Provinsi Jambi	3,647	3,168	-	-	F-hitung > F-tabel yang menyatakan H1 diterima
H2 : Pendapatan Asli Daerah	-	-	2,058	1,674	t-hitung > t-tabel yang

berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> Provinsi Jambi					menyatakan H2 diterima
H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> Provinsi Jambi	-	-	0,383	1,674	t-hitung < t-tabel yang menyatakan H3 ditolak
H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap <i>Fiscal Stress</i> Provinsi Jambi	-	-	2,858	1,674	t-hitung > t-tabel yang menyatakan H4 diterima

Sumber: Disusun oleh peneliti

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independent (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil) terhadap variabel dependent (fiscal stress) secara keseluruhan maka dapat dilihat pada tabel model summary berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,643 ^a	,413	,392	2,97923

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Fiscal Stress

Sumber: Olah Data Primer, 2023

Pada tabel di atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,413 atau 41,3%. Hal ini berarti variabel independent (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil) mempengaruhi variabel dependent (*fiscal stress*) sebesar 41,3%.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Jambi

Fiscal Stress merupakan tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana tekanan keuangan (*Fiscal Stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonom.

Hasil penelitian ditunjukkan dengan hasil uji F menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,019 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,019 yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap *fiscal stress*. Dapat diartikan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi.

Menurut Arnett, (2018) terdapat 5 kategori besar pengukuran *fiscal stress* di tingkat daerah (*state*), antara lain: deficit anggaran (*budget deficits*), saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unreserved budget balance*), penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in states' revenues performance*), peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*) dan rasio keuangan (*financial ratios*).

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gowon, dkk (2021) dengan hasil yang menyatakan bahwa PAD maupun DAU secara bersama-sama tidak mempengaruhi *fiscal stress*, dengan makna lain semakin tinggi PAD maupun DAU yang dianggarkan maka tidak mempengaruhi *fiscal stress*. Sehingga dampak *fiscal stress* dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Pada penelitian ini hanya terdapat variabel PAD dan DAU tidak terdapat variabel dana bagi hasil (DBH).

4.6.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Jambi

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah. Sedangkan fiscal stress merupakan ketidakmampuan pemerintah (daerah) untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek dan jangka panjangnya termasuk ketidakmampuan meningkatkan penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan warga masyarakatnya.

Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum sepenuhnya mampu mendanai pembangunan yang ada di daerah. Artinya, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari Pusat. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal. Oleh sebab itu kondisi fiscal stress ini menyebabkan Pemerintah Daerah wajib menggali sumber-sumber penghasilan yang berpotensi untuk dipungut sebagai Pendapatan Asli Daerah. Dengan peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tanpa mengandalkan bantuan dari Pusat, sehingga kondisi fiscal stress tersebut akan berkurang.

Pendapatan asli daerah merupakan variabel bebas yang diteliti dan diuji. Hasil penelitian ditunjukkan dengan hasil uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,045 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap fiscal stress di Provinsi Jambi. Dapat diartikan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikansi terhadap fiscal stress di Provinsi Jambi.

Menurut Halim (2018) *fiscal stress* dapat mempengaruhi APBD suatu daerah. Hal tersebut dibuktikan dari adanya pergeseran (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan dan pengeluaran APBD. Terkait dengan hal itu, kondisi fiskal stress secara umum tidak menurunkan peran PAD terhadap total anggaran

penerimaan/pendapatan daerah. Komponen dari sektor penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang terpengaruh secara signifikan dengan kondisi fiskal stress adalah proporsi retribusi daerah, sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya sedikit naik dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rupilu, dkk (2020) dengan hasil yang menyatakan bahwa peningkatan PAD memiliki manfaat dan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap tekanan anggaran *fiscal stress*. Penyebab terjadinya *fiscal stress* dikarenakan terjadinya defisit anggaran yaitu PAD yang diperoleh lebih kecil dari pada belanja. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah belum mampu untuk membiayai kebutuhan daerah dan masih bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga upaya untuk meningkatkan PAD yakni pemerintah daerah perlu menggali lagi sumber-sumber penghasilan secara optimal.

4.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Jambi

Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk kedalam Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika dana alokasi umum naik maka kemungkinan *fiscal stress* nya akan turun karena dana alokasi umum akan membantu pendapatan daerah untuk menutupi kekurangan belanja.

Dana alokasi umum merupakan variabel bebas yang diteliti dan diuji. Hasil penelitian ditunjukkan dengan hasil uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,703 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh secara parsial terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi. Dapat diartikan bahwa variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh secara parsial terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi.

Menurut Bastian (2019) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang didapatkan dari APBN yang dianggarkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah dalam membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika daerah tersebut belum bisa mandiri maka

bisa jadi akan menimbulkan defisit anggaran karena belanja daerah tiap tahun akan meningkat sesuai dengan kebutuhan atau yang biasa disebut *fiscal stress*.

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ichi, dkk (2021) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *fiscal stress*. Pada umumnya dana alokasi umum ditujukan untuk membiayai belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah yang ada supaya daerah tersebut tidak mengalami tekanan fiskal (*fiscal stress*). Hal tersebut dibuktikan dengan masih mendominasinya dana alokasi umum dalam pendapatan daerah. Hal tersebut yang kemudian bisa menimbulkan *fiscal stress* karena jika dana alokasi umumnya rendah maka kemungkinan mengalami *fiscal stress* akan besar.

4.6.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Jambi

Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dari pendapatan daerah, dana bagi hasil juga berkontribusi dalam membantu pemerintah daerah merealisasikan anggaran dan perincian perhitungan anggaran sehingga angka *fiscal stress* tidak menjadi lebih tinggi.

Dana bagi hasil merupakan variabel bebas yang diteliti dan diuji. Hasil penelitian ditunjukkan dengan hasil uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,006 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi. Dapat diartikan bahwa variabel dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress* di Provinsi Jambi.

Menurut Baldric (2019) yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan untuk kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyati & Yusriadi (2021) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*. Semakin besar dana bagi hasil ke pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat *fiscal stress* daerah tersebut.

4.6.5 Besar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Secara Simultan Terhadap *Fiscal Stress* Di Provinsi Jambi

Setiap daerah diminta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya masing-masing supaya daerah tersebut bisa berkembang dan bersaing dengan daerah lainnya dalam hal ekonomi dan pembangunan. Selain itu pendapatan juga supaya daerah tidak terlalu ketergantungan terhadap pemerintah pusat, jika pendapatannya lebih besar daripada belanja maka tidak akan terjadi *fiscal stress* namun sebaliknya jika pendapatannya lebih kecil dari belanja maka akan terjadi tekanan fiskal (*fiscal stress*).

Hasil penelitian ditunjukkan dengan hasil uji koefisien determinasi sehingga diperoleh nilai R Square sebesar 0,413 atau 41,3%. Hal ini berarti variabel independent (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil) mempengaruhi variabel dependent (*fiscal stress*) sebesar 41,3%.

Menurut Arnett (2018) mendefinisikan Fiskal stress sebagai ketidakmampuan pemerintah (daerah) untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek dan jangka panjangnya termasuk ketidakmampuan meningkatkan penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan warga masyarakatnya.

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mariani (2018) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa besar pengaruh PAD, dan pertumbuhan belanja modal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *fiscal stress*. Menurut peneliti semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pengeluaran pemerintah. Namun sebaliknya, semakin tinggi pertumbuhan Belanja Modal, semakin tinggi potensi penerimaan pemerintah dapat diharapkan (*expected revenues*) di masa mendatang. Konsekuensinya, semakin tinggi kemungkinan suatu daerah mengalami *fiscal stress*. Pada penelitian ini hanya terdapat variabel PAD

dan Pertumbuhan Belanja Modal tidak terdapat variabel dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap fiscal stress di Provinsi Jambi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil meningkat maka variabel fiscal stress akan meningkat.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi. Artinya pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi fiscal stress. Semakin tinggi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kemungkinannya daerah itu mengalami *fiscal stress*, dikarenakan daerah lebih termotivasi untuk meningkatkan PAD-nya guna mencapai keseimbangan anggaran daerah.
3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi. Artinya Jika dana alokasi umum naik maka kemungkinan fiscal stressnya akan turun karena dana alokasi umum akan membantu pendapatan daerah untuk menutupi kekurangan belanja.
4. Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan untuk kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga Semakin besar dana bagi hasil ke pemerintah daerah maka semakin tinggi tingkat *fiscal stress* daerah tersebut.
5. Besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jambi sebesar 41,3%. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika pendapatan suatu daerah lebih kecil dari belanja maka

akan terjadi tekanan fiskal (fiscal stress), dan sebaliknya jika pendapatannya lebih besar daripada belanja maka tidak akan terjadi fiscal stress.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka diperoleh saran dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kabupaten yang telah terpilih menjadi sampel penelitian agar meningkatkan kinerjanya dalam mengumpulkan penerimaan pendapatan asli daerah terutama dari sisi pajak daerah dan restribusi daerah sehingga tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai, sehingga fiscal stress juga bisa lebih diturunkan.
2. Diharapkan dalam pengalokasian dana agar lebih diperhatikan lagi. Pengalokasian dana harus tepat sasaran sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain dalam komponen guna menambah variasi penelitian dan memperluas objek penelitian tidak hanya di Provinsi Jambi tetapi wilayah Kabupaten/Kota lain yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipura,dkk. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhanekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*.6(3). 34-60.
- Amalia, Rika Sekar. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Belanja Bantuan Sosial*. Surakarta: UMS Press.
- Anggoro, Dwi. D. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Andayani, N.S.D. Dan Moeljadi. Dan Susanto, M.H. (2019). Pengaruh Variabel Internal Dan Eksternal Perusahaan Terhadap Risiko Sistematis Saham Pada Kondisi Pasar Yang Berbeda (Studi Pada Saham-Saham ILQ 45 Di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Wacana*. 13(2). 57-89.
- Aramana, D. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variable moderating pada provinsi sumatera utara. *Jurnal Ilmiah*. 5(11). 27-48.
- Arnett, S. B. (2018). Fiscal stress in the US states: An analysis of measures and responses. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 16(1). 40–61.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azahari, Ria Sartika. (2018). *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Buletin Teknis. (2018). *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*. Jakarta : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFE.
- Baldrick, S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual). edisi Pertama*. Yogyakarta : YKPN.
- Carunia, Mulya Firdausy. (2019). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Caska., & Henny, I. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. Pekanbaru: UR Press.

- Creswell, J.W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Singapore : Sage Publication.
- Djarmika, G.H. (2022). The Effect of Regional Original Income and Balancing Funds on the Allocation of Capital Expenditures in Regencies/Cities of North Sumatra Province. *Neuro Quantology*. 20(7). 107-114.
- Djarmika, G.H. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*. 4(2). 44-65.
- Forza, dkk. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*. 1(1). 49-60.
- Gowon, dkk. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*. 4(4). 23-40.
- Halim, Abdul. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Damayanti. (2018). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 2*. Yogyakarta: UPP STIM Press.
- Jasin, Johan. (2019). *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Kholidi., Zamzami., & Machpudin. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2014). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA*. 2(1). 33-47.
- Lucky., & Prasetyo, F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. 23(2). 25-45.
- Lukman. (2019). Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah. *Jurnal Defis*. 5(5). 27-46.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mankiw, G.N. (2018). *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardianis., Afrizal., & Enggar. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Daerah Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA*. 2(7). 37-49.

- Nadhifah, D., & Sakti. R. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah*. 7(2). 34-49.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A.T. (2015). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta : Danisa Media.
- Nordiawan, & Hertianti. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pangestu et al. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Provinsi Jambi 2009-2017). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*. 4(4). 23-40.
- Periansya. 2019. *Analisa Laporan Keuangan*. Palembang : Politeknik Sriwijaya.
- Perimbangan Keuangan. 2017. *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Praptiningsih, Febryani. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2014*. *Jurnal Akuntansi*. 2(1). 1-14.
- Prasetyo,L.F. (2022). Effect of Regional Original Income, Revenue, Sharing Fund, and Special Allocation Fund for Capital Expenditure and Its Impact on Economic Growth in the District and City in East Kalimantan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. 5(2). 13072-13082.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan. *Jurnal Forum Ekonomi*. 24(1). 45-53.
- Rahardjo, Adisasmita. (2018). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Safitri,I. (2021). The Effect of Regional Original Income, General Allocation, Funds, Specific Allocation Funds, and Fund for the Results of the District Capital Expenditure Allocation and North Sumatra Province City, 2010-2019. *Journal of Management and Solutions (Jomas)*. 1(2). 97-115.
- Sanjaya. (2021). *Fiscal Stress: Growth Aspects of Pad, Growth of Capital Expenditure, and Economic Growth*. 1(1). 177-183.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Saputra, D. (2018). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah*. 3(2). 45-58.
- Sari, Indah Permata. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Bantuan Sosial Di Kota Palembang*. Palembang: UNSRI Press.

- Septira,F. (2019). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Fiscal Stress*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*. 7(1). 57-64.
- Shamsub, H. & Akoto, J.B. (2004). State and Local Fiscal Structures and Fiscal Stress. *Jurnal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 16(1).40-61
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syam,F., & Zulfikar,A. (2018). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Minangkabau*. 2(2). 35-47.
- Suriasoemantri, J. (2020). *Metode Penelitian Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan
- Tolosang, Krest. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 18(3).
- Widjaja. (2019). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, A. (2018). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : Grafindo.
- Yawa, H. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Efisiensi*. 15(4). 366-516.
- Yulsiati, H. (2018). The Effect of Local Revenus -Sharing and a General Allocation of Funds to the Direct Expenditure on the Regency/Municipality Governments in South Sumatra Province. *Journal Research and Analysis : Accounting and Financial*. 3(11). 2597-6613.

LAMPIRAN**Lampiran 1. Kabupaten/Kota Yang Ada Di Provinsi Jambi**

No	Kabupaten / Kota
1	Kerinci
2	Merangin
3	Sarolangun
4	Batanghari
5	Muaro Jambi
6	Tanjung Jabung Timur
7	Tanjung Jabung Barat
8	Tebo
9	Bungo
10	Kota Jambi
11	Kota Sungai Penuh

Lampiran 2. Tabulasi Data

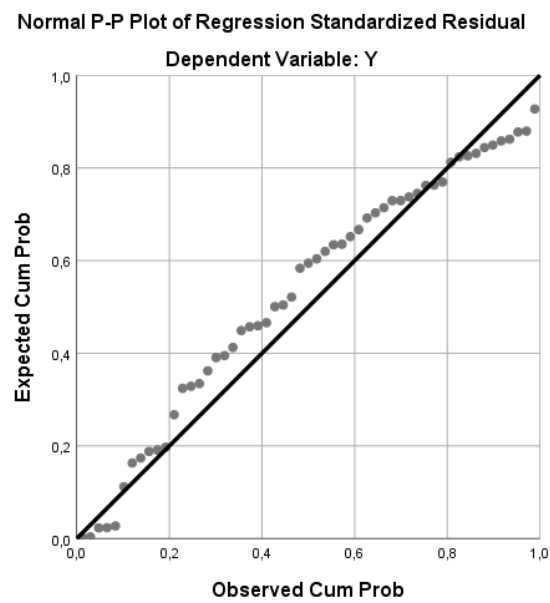
No	Kabupaten/ Kota	Tahun	PAD	DAU	DBH	Fiscal Stress
1	Kerinci	2018	80.235.000.000	589.202.611.000	37.480.152.000	1.290.418.835
2		2019	104.739.430.000	612.248.352.000	45.082.710.719	1.408.461.829
3		2020	81.665.603.732	739.486.200.000	56.004.400.000	1.203.597.144
4		2021	85.905.046.225	576.227.015.000	33.821.809.000	1.211.203.530
5		2022	89.626.711.527	653.200.000.000	3.664.648.380	1.181.842.755
6	Merangin	2018	85.426.106.000	718.849.295.000	46.637.142.000	1.357.642.467
7		2019	86.630.626.000	740.887.360.000	73.295.863.003	1.497.443.153
8		2020	100.322.387.751	699.437.069.000	47.806.149.697	1.370.620.154
9		2021	116.712.554.237	680.525.643.000	38.429.112.000	1.367.122.049
10		2022	118.223.180.819	614.000.000.000	6.884.376.000	1.401.612.272
11	Sarolangun	2018	99.780.471.000	583.152.387.000	83.564.406.000	1.365.193.291
12		2019	121.162.901.000	599.555.685.000	87.431.000.000	1.433.000.521
13		2020	70.098.806.982	577.641.255.000	53.492.000.000	1.155.460.296
14		2021	82.967.503.267	546.671.956.000	92.792.890.000	1.149.619.271
15		2022	25.000.000.000	546.400.000.000	2.500.000.000	1.264.611.914
16	Batanghari	2018	112.000.000.000	605.739.426.000	115.197.275.000	1.223.476.264
17		2019	141.502.561.000	627.388.776.000	96.819.375.077	1.393.999.590
18		2020	104.230.889.088	658.758.214.799	177.850.640.535	1.197.376.863
19		2021	148.444.860.321	578.344.367.000	128.756.600.000	1.284.859.823
20		2022	107.000.000.000	819.200.000.000	5.067.513.563	1.207.156.522
21	Muaro Jambi	2018	76.902.526.000	670.341.091.000	105.764.428.000	1.362.641.442
22		2019	80.017.173.000	699.024.250.000	64.334.016.000	1.382.424.142
23		2020	92.797.887.531	714.704.528.000	92.261.855.000	1.323.380.486
24		2021	97.000.000.000	639.992.420.000	107.710.900.000	1.338.231.189
25		2022	113.000.000.000	652.000.000.000	6.858.981.147	1.290.314.106
26	Tanjung Jabung Timur	2018	73.171.211.000	533.829.506.000	99.367.693.175	1.212.649.259
27		2019	42.709.243.000	564.422.212.000	63.505.474.321	1.225.249.382
28		2020	49.646.511.513	523.900.364.000	37.480.675.333	1.052.605.270
29		2021	81.601.471.901	531.799.472.000	93.179.742.009	1.199.712.766
30		2022	67.926.433.911	562.800.000.000	136.167.779.000	1.167.856.544
31	Tanjung Jabung Barat	2018	85.000.000.000	506.589.288.000	304.324.465.000	1.616.739.173
32		2019	100.284.726.000	536.177.694.000	124.954.773.000	1.568.057.751
33		2020	115.556.810.302	176.147.736.950	46.616.796.420	1.421.415.183
34		2021	120.000.000.000	495.245.924.000	244.465.259.000	1.421.415.183
35		2022	116.048.028.500	644.000.000.000	6.965.834.897	1.505.718.210
36	Tebo	2018	72.822.004.000	582.313.417.000	66.378.847.000	1.148.064.441
37		2019	74.389.016.000	598.297.279.000	61.251.000.000	1.157.330.855
38		2020	78.459.424.383	585.287.411.000	53.492.000.000	1.085.601.956

39		2021	97.500.000.000	545.876.348.000	56.662.838.000	1.038.176.777
40		2022	93.498.645.830	612.000.000.000	5.232.446.866	1.023.078.134
41	Bungo	2018	137.656.958.000	635.999.293.000	59.216.348.000	1.375.153.847
42		2019	151.297.834.000	656.106.480.000	69.365.540.000	1.616.706.122
43		2020	126.132.857.982	664.858.933.000	74.833.540.000	1.273.509.638
44		2021	79.404.350.000	608.905.893.000	67.069.688.000	1.507.514.985
45		2022	171.707.303.227	972.600.000.000	8.557.663.706	1.315.050.838
46	Kota Jambi	2018	328.896.648.000	714.783.378.000	118.638.905.000	1.754.896.149
47		2019	364.142.193.000	757.404.051.000	180.362.017.000	1.710.612.143
48		2020	355.674.818.035	1.288.418.327	157.683.636.000	1.621.827.275
49		2021	384.000.000.000	697.632.020.000	89.173.247.000	1.655.334.440
50		2022	302.000.000.000	2.598.000.000.000	35.467.000.046	1.635.122.617
51	Kota Sungai Penuh	2018	42.626.152.000	422.532.652.000	39.455.294.000	779.750.688
52		2019	47.073.181.000	447.899.516.000	40.581.362.000	868.042.890
53		2020	29.050.525.938	459.655.505.000	45.493.609.542	749.342.007
54		2021	89.484.018.181	418.470.255.000	34.872.376.000	767.341.775
55		2022	99.143.521.000	459.000.000.000	3.233.203.900	745.030.337

Lampiran 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Pendapatan Asli Daerah	55	25000000000,00	384000000000,00	116332656585,1455
Dana Alokasi Umum	55	1288418327,00	2598000000000,00	630123653583,1998
Dana Bagi Hasil	55	2500000000,00	304324465000,00	73337405406,1091
Fiscal Stress	55	745030337,00	1754896149,00	1288738482,6000
Valid N (listwise)	55			

Lampiran 4. Uji Normalitas

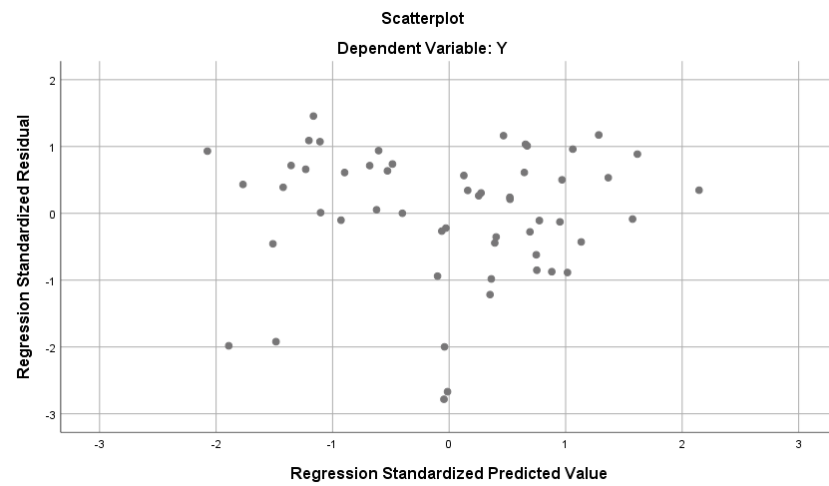


Lampiran 5. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,088	,476		16,997	,000		
	Pendapatan Asli Daerah	,017	,008	,265	2,058	,045	,974	1,027
	Dana Alokasi Umum	,011	,029	,050	,383	,703	,967	1,034
	Dana Bagi Hasil	,066	,023	,372	2,858	,006	,954	1,049

a. Dependent Variable: Fiscal Stress

Lampiran 6. Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 7. Hasil Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	8,088	,476	
	Pendapatan Asli Daerah	,017	,008	,265
	Dana Alokasi Umum	,011	,029	,050
	Dana Bagi Hasil	,066	,023	,372

a. Dependent Variable: Fiscal Stress

Lampiran 8. Hasil Uji F (simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,072	3	,024	3,647	,019 ^b
	Residual	,336	51	,007		
	Total	,408	54			

a. Dependent Variable: Fiscal Stress

b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Lampiran 9. Hasil Uji t (parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,088	,476		16,997	,000
Pendapatan Asli Daerah	,017	,008	,265	2,058	,045
Dana Alokasi Umum	,011	,029	,050	,383	,703
Dana Bagi Hasil	,066	,023	,372	2,858	,006

a. Dependent Variable: Fiscal Stress

Lampiran 10. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,643 ^a	,413	,392	2,97923

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Fiscal Stress

Lampiran 11. Tabel F

Tabel Uji F

$\alpha =$ 0,05	$df_1 = (k-1)$							
$df_2 = (n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161,44 8	199,500	215,70 7	224,583	230,162	233,98 6	236,768	238,883
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278

30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409	2,323	2,255
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399	2,313	2,244
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389	2,303	2,235
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380	2,294	2,225
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372	2,285	2,217
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364	2,277	2,209
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356	2,270	2,201
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349	2,262	2,194
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342	2,255	2,187
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	2,249	2,180
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330	2,243	2,174
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324	2,237	2,168
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,318	2,232	2,163
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313	2,226	2,157
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308	2,221	2,152
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304	2,216	2,147
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299	2,212	2,143
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295	2,207	2,138
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290	2,203	2,134
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286	2,199	2,130
51	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283	2,195	2,126
52	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279	2,192	2,122
53	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275	2,188	2,119
54	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272	2,185	2,115
55	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269	2,181	2,112
56	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266	2,178	2,109
57	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263	2,175	2,106
58	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260	2,172	2,103
59	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257	2,169	2,100
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254	2,167	2,097
61	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251	2,164	2,094
62	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249	2,161	2,092
63	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246	2,159	2,089

Lampiran 12. Tabel t

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526